

BAB III
PERAN TURKI SEBAGAI PENENGAH MASALAH
NUKLIR IRAN

Dalam Bab ini penulis ingin Membahas Peran Turki Sebagai Penengah Masalah Nuklir Iran yang didalamnya akan menguraikan mengenai isu nuklir Iran yang akan memberikan penjelasan tentang riwayat nuklir Iran, isu nuklir Iran, peran strategis Turki, serta ancaman nuklir Iran. Dan Peran Strategis Turki.

A. Senjata Nuklir

Senjata nuklir merupakan senjata yang mempunyai daya hancur yang sangat dahsyat yang mampu menghancurkan sebuah kota. Senjata nuklir pernah digunakan pada saat perang dunia ke II yaitu antar amerika dan jepang (Hiroshima dan Nagasaki). Pada masa itu, daya ledak nuklir masih sebesar 20 kilo (ribuan) ton TNT, namun dimasa sekarang daya ledaknya sudah mencapai 70 mega (jutaan) ton TNT.

Senjata nuklir mempunyai dua tipe dasar. Tipe pertama menghasilkan energi ledakannya hanya dari process reaksi fisi. Senjata tipe ini secara umum dinamai bom atom (atomic bomb, A-bombs). Energinya hanya diproduksi dari inti atom, Tipe kedua memproduksi sebagian besar energinya melalui reaksi fusi nuklir. Senjata jenis ini

disebut senjata termonuklir atau bom hidrogen (disingkat sebagai bom-H).³¹

Berikut ini adalah daftar negara dengan senjata nuklir. Ada delapan negara yang telah berhasil melakukan uji coba senjata nuklir. Lima diantaranya dianggap sebagai "negara dengan senjata nuklir", sebuah status yang diberikan oleh Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty* atau NPT). Kelima negara tersebut dalam urutan kepemilikan senjata nuklir adalah:

1. Amerika Serikat,
2. Rusia (bekas Uni Soviet),
3. Britania Raya,
4. Perancis
5. Republik Rakyat Cina.

Diluar kelima negara NPT tersebut, ada tiga negara yang pernah melakukan uji coba nuklir yaitu:

1. India,
2. Pakistan
3. Korea Utara.

Walaupun Israel menyangkal memiliki senjata nuklir, tetapi diyakini memiliki sejumlah senjata nuklir. Sebanyak 200 senjata nuklir pernah dilaporkan berada dalam persenjataannya. Keempat negara terakhir tadi tidak secara formal diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir

³¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_nuklir

karena bukan penandatanganan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir. Selain negara-negara tersebut, Iran juga telah melakukan pengembangan teknologi pengayaan uranium dan dituduh melakukannya untuk keperluan senjata nuklir oleh PBB. Iran bersikeras bahwa pengembangan nuklir mereka adalah untuk keperluan pembangkit tenaga nuklir. Pada 4 Februari 2006, Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency* atau IAEA) melaporkan Iran ke Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan program nuklir mereka.³²

B. Isu Nuklir Iran

1. Riwayat Nuklir Iran

Langkah pertama yang dilakukan Iran menuju teknologi nuklir di Iran dimulai dengan pendirian “Pusat Atom Universitas Teheran” Pada tahun 1956. Itu terjadi tiga tahun sesudah peluncuran Eisenhower Plan tentang “Atom untuk Perdamaian” pada 1953. Dalam mempromosikan rencananya, Presiden AS itu menyerahkan reaktor nuklir kepada Iran dengan kapasitas 5 MW. Reaktor itu biasa bekerja dengan uranium yang diperkaya hingga 93% yang diberikan oleh AS. Harus dikatakan bahwa uranium yang diperkaya di atas 90% dapat digunakan untuk membuat bom atom. Lebih jauh lagi, Pemerintahan AS mengirim kepada Iran fasilitas-fasilitas untuk memisahkan uranium.

³² http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_dengan_senjata_nuklir

Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) didirikan Pada tahun 1974. Sesudah itu, pemerintah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk pertumbuhan cepat ilmu pengetahuan nuklir. Tujuan utama pemerintah adalah membangun 23 reaktor atom dengan kapasitas 23.000 MW. Jumlah tenaga kerja pada AEOI meningkat drastis dan ratusan ahli dikirim untuk pelatihan ke AS, Jerman, Inggris, Perancis, Kanada, Italia, dan Belgia. Pada 1974 Iran membayar US\$ 1 milyar kepada Perancis untuk pembangunan fasilitas uranium pengayaan Tricastin dan membeli 10% saham ORDIF (konsorsium pengayaan uranium).

Selama tahun 1974-1978 kontrak-kontrak atau persetujuan-persetujuan untuk membangun 8 pembangkit listrik tenaga atom ditandatangani oleh AEOI dan kontraktor-kontraktor asing, termasuk pembangkit listrik tenaga atom Bushehr (Iran I dan II) oleh Jerman, pembangkit listrik tenaga atom Karun (Iran III dan IV) oleh Perancis, pembangkit listrik tenaga atom Isfahan (Iran V dan VI) oleh Jerman dan pembangkit listrik tenaga atom Saveh (Iran VII dan VIII) oleh Jerman. Selama tahun 1974-1976 Iran menandatangani kontrak 10 tahun yang bisa diperpanjang untuk pemutaran bahan bakar dengan AS, Jerman, dan Perancis.

Pada waktu itu negara-negara Barat biasa bersaing untuk memberikan alat pemutar bahan bakar kepada Iran. Hal aneh adalah bahwa ketika itu tidak ada pembicaraan mengenai energi nuklir Iran sebagai negara yang memiliki sumber minyak dan gas, dan tidak ada pembicaraan

mengapa Iran yang memiliki sumber minyak dan gas yang besar mencari bahan bakar nuklir. mengingat bahwa selama 30 tahun terakhir populasi Iran telah meningkat dua kali lipat, dengan permintaan energi yang terus-menerus meningkat dan mempertimbangkan keterbatasan sumber energi fosil serta pengeluaran yang tinggi untuk mengeksploitasikannya, maka wajar bahwa Iran mencari sumber energi lain yang dapat diandalkan.

Bagaimanapun, perbandingan antara program nuklir Iran sebelum dan sesudah revolusi membuktikan bahwa standar ganda dengan motivasi politiklah yang telah dikenakan kepada Iran oleh negara-negara Barat.

Setelah kemenangan Revolusi Islam Iran memutuskan melanjutkan program nuklir damai. Akan tetapi AS dan Negara-negara Barat merasa keberatan akan hal itu. Kemudian Iran bergerak ke depan dalam kerangka regulasi- regulasi Fakta Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan menyandarkan diri pada kemampuannya yang menghasilkan pencapaian-pencapaian yang besar. Ketika Barat menuduh Iran mencari sasaran militer, mereka memutuskan menjawab keprihatinan Barat dengan bekerja sama dengan UE3 (Inggris, Perancis, dan Jerman) untuk membuktikan bahwa program nuklir mereka bertujuan damai. Pada tahap awal negosiasi, mereka meminta Iran menanggukkan aktivitas pengayaan di Natanz yang Kemudian Iran menanggukkan semua aktifitas nuklirnya.

Pada Desember 2003 Iran menanggukkan aktivitas pengayaan. Penanggukan ini tidak didasarkan pada komitmen mereka, tapi hanya

bersifat suka rela dan sementara. Akan tetapi Iran memahami bahwa AS

dan Negara-negara Barat menginginkan penangguhan diubah menjadi komitmen yang mengikat bagi Negara Iran. Yang kemudian Iran menandatangani Protokol Tambahan dan mulai mengimplementasikan, bahkan sebelum protokol itu diratifikasi di parlemen. Iran telah memulai negosiasi dengan Barat dengan anggapan bahwa mereka mempunyai keprihatinan sah yang sebenar-benarnya tentang aktivitas nuklir damai. Iran juga percaya bahwa teknologi nuklir damai adalah hak mutlak yang dimilikinya. mereka berunding dengan UE3 selama tiga tahun. Tapi kemudian Iran menyimpulkan bahwa hal ini hanya membuang-buang waktu dan energi selama tiga tahun. Pada Maret 2005 Iran menyerahkan proposal kepada Uni Eropa (EU), tapi setelah lima bulan mereka menolak proposal itu. Pada Agustus 2005 AS memberikan paket tawaran kepada Iran, akan tetapi mereka meminta penangguhan penuh dan tanpa batas aktivitas pengayaan uranium yang dilakukan Iran. Setelah tiga tahun perundingan, Iran menyadari bahwa dengan cara ini mereka tidak akan mendapatkan haknya. Maka mereka memulai kembali aktivitas pengayaan. Pada 1 Juni 2006, AS mengajukan paket baru kepada Iran, akan tetapi walau terdapat kejanggalan, Iran akan memperlajarinya secara positif dan mereka akan menjawab pada 22 Agustus. Sayangnya, AS meloloskan Resolusi No 1696 di DK PBB. Walaupun mereka mengeluarkan resolusi ini, pada 22 Agustus kami menjawab kepada proposal UE3. Pada 23 Desember 2006, AS meloloskan resolusi 1737 di DK PBB dan menerangkan sanksi terhadap Iran termasuk larangan

(IAEA) dan Uni Eropa. Tapi seperti biasanya, semua tuduhan dan klaim kosong ini dijawab secara transparan oleh Republik Islam Iran.

Beberapa tahun belakangan, Teheran menjadi tuan rumah yang baik bagi kunjungan tim investigasi IAEA yang terkadang datang tiba-tiba. Menyusul perundingan Saadabad (Istana Kepresidenan Iran), Republik Islam Iran secara sukarela melakukan penundaan aktivitas nuklirnya selama 20 bulan termasuk menyetel instalasi UCF Isfahan dan juga menerima kode 1/3 dari urutan cabang NPT. Berdasarkan hal ini, para investigator IAEA berhak kapan saja untuk memeriksa instalasi nuklir Iran.

Tahun 2005 Mahmoud Ahmadinejad terpilih sebagai Presiden Republik Islam Iran. Ahmadinejad menerima penyerahan jabatan dari pemerintah kubu Reformasi dalam kondisi di mana ia mengkritik keras kebijakan mereka menunda aktivitas nuklir Iran.

Ayatollah Sayyid Ali Khamenei sering kali menekankan untuk menindak lanjuti hak nuklir sipil Iran. berkaitan dengan hal ini, Rahbar di hari pertama bulan Tir 1383 (21 Juni 2004) saat bertemu dengan para ilmuwan Iran mengeluhkan langkah-langkah sebagian analisir dalam negeri yang berusaha mengikuti niat Amerika dalam masalah nuklir. Beliau juga menyinggung propaganda musuh terkait semakin dekatnya Iran membuat bom atom dan mengatakan, "Dengan propaganda yang dilakukan ini mereka ingin mendoktrin bahwa Iran tak akan pernah berhasil, karena nuklir ini tak memberi manfaat apapun.. Dan patut

disayangkan sebagian antek-antek asing yang hina dalam negeri namun penuh klaim kembali mengulangi ucapan-ucapan semacam ini. Mereka yakin bahwa tidak ada jalan lain untuk memanfaatkan energi nuklir selain mencium tangan Amerika."

Ayatollah Sayyid Ali Khamenei menyebut alasan utama aksi kontroversial Amerika terkait aktivitas nuklir Iran sebagai kecemasan musuh terhadap bangsa dan negara ini yang ingin menasionalisasikan ilmu dan teknologi nuklir di Iran dan upaya para ilmuwan Iran untuk menjamin bahan bakar yang dibutuhkan reaktor nuklir Bushehr.

Transformasi penting di Timur Tengah seperti semakin perkasanya Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina, semakin tenangnya situasi pemerintah Irak, penyelenggaraan periode kedua pemilu Presiden Afghanistan, dan kekalahan 33 dan 22 hari Zionis Israel serta kemajuan Iran di pelbagai bidang termasuk ilmu dan teknologi nuklir, nano teknologi, satelit Omid, stem sel (sel buncah) dan lain-lainnya membuat George W. Bush, Presiden Amerika waktu itu cenderung mengusulkan perundingan dengan Iran, namun Republik Islam Iran tidak tunduk pada segala bentuk prasyarat seperti penghentian pengayaan uranium dalam setiap perundingan.

Dalam situasi yang demikian, Barack Obama menjadi Presiden Amerika dengan klaim ingin melakukan perundingan tanpa syarat. Beberapa waktu setelah menjabat sebagai Presiden Amerika, dalam

sebuah wawancara Obama mengatakan "Dikatakan bahwa saya

Iran ingin membuka kepalan tangannya, mereka akan menyaksikan uluran tangan kami."

Namun krisis kehadiran Amerika di Irak dan Afghanistan memaksa negara ini untuk berinteraksi dengan Iran tanpa syarat. Di sini Republik Islam Iran memberikan jawaban konstruktif untuk melakukan kerjasama di bidang pemberantasan terorisme sekalipun Amerika masih tetap melanjutkan sikapnya yang ambigu dan standar ganda.

Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika pasca kemenangan kembali Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilu presiden Iran terpaksa menolak upaya penjatuhan sanksi lebih berat terhadap Iran dan bersamaan dengan itu Kate Wiseman, mantan anggota AIPAC menilai perundingan dengan Iran sebagai satu-satunya solusi. Dikatakannya, "Pada akhirnya kita harus menerima program sipil nuklir Iran. Sudah terlambat untuk menghentikan program ini secara keseluruhan. Oleh karenanya, kita harus menciptakan hubungan dengan Iran agar Iran menyepakati investigasi internasional." Richard Murphy, mantan Deputy Menteri Luar Negeri Amerika juga menyinggung ucapan Robert Gates, Menteri Pertahanan Amerika bahwa program nuklir Iran tidak punya solusi militer dan harus diselesaikan lewat diplomasi."

Sekalipun Mohammad ElBaradei, mantan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) berkali-kali menegaskan bahwa program nuklir sipil Iran hanya diperuntukkan untuk tujuan-tujuan damai, namun

negara-negara anggota kelompok 5 + 1 yang menyalur Amerika

Perancis, Inggris, Rusia, Cina ditambah Jerman yang berusaha menjadi penengah internasional untuk menindaklanjuti masalah nuklir Iran berusaha mengulur-ulur waktu. Dengan demikian, mereka berharap dapat menekan Iran mengambil sikap pasif. Usaha ini berusaha menciderai citra Iran di tingkat internasional, khususnya untuk meraih dukungan negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) terkait aktivitas nuklir sipilnya.

Iran tidak tinggal demikian. Dengan menyerahkan paket usulannya, semua konstelasi politik yang diharapkan Barat berubah dan menguntungkan Iran. Pengumuman mendadak berita pembangunan instalasi kedua pengayaan nuklir Iran di Fordo (18 bulan sebelum penyuntikan bahan bakar) oleh Presiden Ahmadinejad saat melawat New York dan kunjungan Mohammad ElBaradei ke Iran kembali menyentak dunia. Kejadian ini membuat dunia yakin betapa kemajuan Iran tidak dapat dikembalikan ke belakang dan membuktikan transparansi Iran dalam urusan program nuklir. Langkah Iran akhirnya membuat Barat bersikap pasif.

Pertemuan negara-negara anggota kelompok 5 + 1 di Jenewa dihadiri juga oleh Saeed Jalili, Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Republik Islam Iran. Menurut Jalili, sebuah kesempatan dan ujian bagi pihak-pihak yang berdialog dengan Iran untuk dapat menarik perhatian Iran terkait pelbagai masalah, termasuk masalah jaminan bahan bakar reaktor riset Tebran

Usulan ini disambut baik oleh sebagian negara termasuk Rusia, Perancis, dan Amerika dan siap menjamin bahan bakar reaktor riset Tehran. Sekalipun telah menyatakan kesiapannya menjamin kebutuhan bahan bakar reaktor ini, Barat tetap saja melakukan tekanan politik yang membuat proses alami jaminan bahan bakar IAEA untuk konsumsi medis Iran berkali-kali mengalami kebuntuan. Sikap Iran yang siap menyerahkan bahan 3,5 persennya untuk ditukarkan dengan bahan bakar yang telah diperkaya 20 persen di Iran di bawah pengawasan IAEA, ternyata masih dimanfaatkan Barat untuk menekan Iran.

Saat memperingati Hari Ulang Tahun Kemenangan Revolusi Islam Iran Ke-31, Iran menyatakan telah memproduksi uranium 20 persen dan telah memasuki tahapan selanjutnya untuk dikonsumsi. Tampaknya kekokohan Iran ini membuat Ban Ki-moon, Sekjen PBB menyatakan, masalah nuklir Iran harus diselesaikan dengan dialog dan perundingan damai.

berbagai ancaman yang dilakukan Barat terhadap Iran dan rencana jahat mereka seperti meneror ilmuwan nuklir Iran, namun hal itu tidak menggemingkan sikap Iran untuk tetap meraih kemajuannya di bidang nuklir sipil. Iran juga tetap akan memanfaatkan energi nuklir sipil untuk tujuan-tujuan damai.

Berlanjutnya upaya Iran untuk mencari tempat yang ideal untuk membangun instalasi nuklir baru dan juga pengoperasian reaktor Bushehr tahun ini disertai penelitian luas terkait jaminan keamanan instalasi ini

ditambah kemajuan sains dan teknik industri terkait teknologi menghembuskan berita gembira nuklir. Dengan demikian, slogan "Tekad Eksta dan Usaha Ekstra" yang disampaikan Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatollah Al-Udzma Sayyid Ali Khamenei bakal terealisasikan di tahun ini.

2. Isu Nuklir Iran

Program pengayaan bahan bakar nuklir merupakan isu utama yang melatar belakangi isu nuklir Iran saat ini, kemudian dikhawatirkan akan digunakan untuk produksi senjata berdaya ledak nuklir.³⁴ Pengayaan uranium yang memungkinkan pembuatan senjata nuklir oleh Iran, membuat Negara-negara barat khususnya Amerika serikat merasa hal ini sebagai sebuah ancaman. Amerika Serikat beranggapan bahwa Iran bisa saja melakukan pengayaan uranium yang bertujuan untuk persenjataan nuklir. Amerika serikat dengan berbagai cara melakukan tindakan yang menginginkan Iran memberhentikan Program nuklirnya, namun Iran bersikeras akan meneruskan program nuklir yang bertujuan untuk pembangkit energi. Ketegangan antara kedua Negara menarik perhatian dan menjadi berita utama media massa dunia saat ini

Akhir - akhir ini ketegangan itu semakin memanas, seiring dengan dibawanya isu ini ke Dewan Keamanan (DK) PBB. Iran mengancam akan melanjutkan pengayaan uranium berskala penuh jika pengawas nuklir PBB

memaksakan sanksi atas program nuklirnya. Sementara pemerintah AS mengancam kemungkinan adanya konsekuensi menyakitkan bagi Iran, seperti dilontarkan Dubes AS untuk PBB John Bolton seiring persiapan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk bersidang membahas kemungkinan mengadukan Iran ke DK PBB.

Ali Larijani selaku ketua perunding nuklir Iran mengatakan, Jika masalah nuklir Iran dibawa ke Dewan Keamanan PBB, pengayaan uranium skala besar akan dilanjutkan kembali, Jika mereka ingin menggunakan kekerasan, maka Iran akan menempuh jalur sendiri. tambahnya seperti dilansir kantor berita Associated Press. Menurutnya, Iran telah menggunakan semua cara damai untuk menyelesaikan isu nuklir ini. Ditegaskan bahwa Iran tidak akan menghentikan riset nuklir ataupun mundur dari upayanya menjalankan program nuklir. Iran bersikukuh bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai, yakni sebagai pembangkit energi. Larijani menambahkan bahwa jika Iran dikenai sanksi atau aksi militer atas permintaan negara-negara Barat dengan restu DK, maka mereka tidak akan mundur. Jika masalah nuklir Iran dibawa ke DK PBB, situasi akan menjadi sulit bagi mereka. Mereka harus mengetahui bahwa Iran tidak akan mengabaikan hak-haknya.³⁵

Negara-negara Barat mengkhawatirkan Iran memproduksi senjata nuklir dan menegaskan negara itu harus menghentikan seluruh kegiatan

menyangkut pengayaan uranium, termasuk riset dan pengembangan, bagi dilanjutkannya perundingan.³⁶

Pembicaraan selama 40 hari dari 60 hari yang direncanakan antara Iran dan IAEA telah membawa kemajuan yang signifikan, yaitu meningkatnya tingkat kerja sama di pihak Iran sesuai dengan rencana kerja kedua pihak. El-Baradei juga menyatakan, menyangkut program nuklir Iran saat ini, kami telah mampu membuktikan ketiadaan pengalihan semua bahan nuklir yang dideklarasikan. Kami juga melakukan pendekatan perlindungan (*safeguard*) untuk fasilitas nuklir di Natanz yang memungkinkan kami memverifikasi seluruh aktivitas pengayaan di sana.

Negara-negara Non-Blok pada pertemuan Dewan Gubernur IAEA di Wina mengeluarkan pernyataan pada 22 November, yang berterima kasih kepada El-Baradei untuk laporannya mengenai implementasi Perjanjian Perlindungan IAEA di Iran. Sejak awal, Non-Blok ingin mengingatkan kembali posisinya tentang isu ini, sebagaimana terefleksi dalam pernyataan isu nuklir Republik Islam Iran yang diadopsi pada KTT Non-Blok ke-14 yang dilaksanakan di Havana, Kuba, pada 15 dan 16 September 2006. Para kepala negara dan pemerintahan meneguhkan kembali hak dasar dan mutlak semua negara untuk mengembangkan riset, produksi dan penggunaan energi atom untuk tujuan damai, tanpa ada diskriminasi dan bersesuaian dengan kewajiban-kewajiban legal masing-masing. Karena itu, tidak ada yang mesti diinterpretasikan dalam suatu

³⁶ http://www.bahar.ac.id/medikita/summit/medikita_rhb2muangAktualite&artikelrhb2

cara yang menghalangi atau membatasi hak negara-negara ini untuk mengembangkan energi atom untuk tujuan damai.

Namun, Amerika telah mengabaikan laporan itu dan bersumpah akan meneruskan upaya menjatuhkan sanksi baru terhadap Republik Islam Iran untuk memaksa Teheran meninggalkan hak-hak nuklirnya yang ditentukan dalam NPT. Amerika telah mengumumkan bahwa ia tidak melihat penemuan-penemuan El-Baradei sebagai hasil positif yang diperlukan dan bertahan terhadap sanksi. Hal ini menyangsikan komunitas internasional bahwa Amerika yang mengancam Iran dengan serangan militer benar-benar ingin menyelesaikan kasus nuklir Iran secara diplomatik.

Masalah yang dihadapi adalah mengapa Amerika masih mengancam Iran dengan sanksi yang lebih berat, sebelumnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didominasi Amerika telah menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik melalui Resolusi DK PBB Nomor 1737 dan 1747 sementara penyelesaian melalui jalan diplomatik semakin terbuka lebar dengan adanya kemajuan-kemajuan dalam proses kerja sama Iran-IAEA? Lagi pula IAEA adalah badan PBB yang memiliki otoritas teknis dalam hal nuklir, bukan DK PBB. Sepanjang Iran terus bekerja sama teknis dengan IAEA, apalagi kerja sama itu telah membawa banyak kemajuan dengan terjawabnya banyak pertanyaan seputar kegiatan nuklir Iran di masa lalu, tentunya sekarang tidak ada alasan untuk

membawa masalah ini ke DK PBB, karena hanya akan merusak kredibilitas IAEA dan DK PBB itu sendiri.

Dengan adanya laporan IAEA yang baru ini, seorang diplomat yang berbasis di Wina memastikan bahwa tidak akan ada resolusi yang akan dikeluarkan IAEA pada tahap ini. Namun, melihat sikap Amerika dan motifnya di balik isu nuklir Iran, bisa dipastikan Washington akan mencari jalan lain untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara di Teluk Persia itu, kalau anggota DK PBB lain, terutama dua negara pemegang hak veto (Cina dan Rusia yang merupakan teman Iran), tidak mendukung sanksi baru.

Sesungguhnya Amerika ingin menjadikan isu ini sebagai senjata untuk mengisolasi Iran secara ekonomi dan politik. Iran tidak boleh berkembang menjadi negara Timur Tengah yang kuat karena akan mengancam hegemoni Amerika di kawasan vital itu. Alasan lain, letak Iran terlalu strategis untuk dibiarkan tumbuh secara mandiri. Memang Iran yang terletak di Teluk Persia, mengontrol Selat Hormuz, memiliki sumber daya alam terutama minyak dan gas yang melimpah, dan merupakan gerbang utama ke Asia Tengah dapat mengancam kepentingan Amerika, yang ingin membangun Pax Americana atau Imperium Amerika. Namun, dengan adanya laporan baru IAEA, Amerika tidak akan bisa mengisolasi Iran. Sebaliknya, Amerika sendiri yang akan terisolasi.³⁷

³⁷ <https://www.unisadep.org/artikel-detail-ke?id=0041&artikel&id=27&id=2>

3. Ancaman Nuklir Iran

Pada 4 Pebruari 2006, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) memutuskan untuk mengajukan permasalahan nuklir Iran ke DK PBB. Keputusan ini diambil setelah diadakan pemungutan suara putaran kedua para anggota Dewan Gubernur Dewan Atom Internasional. Dari 35 anggota Dewan yang mempunyai hak pilih, 27 menyatakan setuju, 3 menolak dan 5 abstain. Indonesia yang juga menjadi anggota Dewan Gubernur ini memilih untuk abstain bersama dengan Libya, Afrika Selatan, Belarusia dan Algeria.³⁸

Dukungan yang sangat besar terhadap resolusi pengajuan masalah Iran ke DK PBB ini menimbulkan beberapa kemungkinan yang menarik untuk dicermati: (1) kecurigaan kuat dunia internasional terhadap niat Iran untuk membangun persenjataan nuklir; (2) keinginan P-5 untuk menjaga status eksklusif kekuatan nuklir; (3) ketidakmampuan badan internasional, PBB, menjaga hak dan kedaulatan anggotanya.

Dari fakta bahwa 27 dari 35 anggota Dewan Gubernur Badan Energi Atom Dunia yang menyetujui resolusi pengajuan masalah nuklir Iran ke DK PBB, maka bisa disimpulkan bahwa dunia internasional tidak percaya dengan dalih Iran bahwa saat ini Iran hanya membangun teknologi nuklirnya untuk kepentingan sipil.

Kecurigaan ini muncul dari penolakan Iran terhadap tawaran negara-negara Eropa untuk membantu proses pengayaan uranium di luar

Iran. Tawaran serupa baru-baru ini juga diberikan oleh Rusia tetapi mendapatkan respons yang sama dari Iran. Alasan Iran tidak selamanya Iran tergantung kepada negara lain tentang kebutuhan nuklirnya dan karenanya Iran harus membangun semua teknologi nuklirnya sendiri.

Pengembangan teknologi nuklir sipil yang tidak terawasi bisa dengan mudah dibelokkan kepada tujuan militer. Kasus nuklir Iraq pada tahun 1991 dan juga Korea Utara menjadi bukti bahwa pengembangan teknologi persenjataan nuklir sangat mudah untuk disembunyikan. Kenyataan bahwa negara-negara tersebut, seperti halnya Iran, termasuk didalam negara penandatangan Perjanjian Non-proliferasi nuklir tidak bisa membantu proses pengawasan pengembangan teknologi nuklir.

Kemungkinan kedua bahwa P-5 (negara-negara anggota tetap DK PBB) bersikeras untuk menjaga eksklusifitas teknologi nuklir diantara mereka sendiri juga bisa dijadikan alasan mengapa kasus nuklir Iran harus diajukan kepada DK PBB. Dengan menjadikan teknologi nuklir sebagai hak eksklusif mereka maka ketakutan bahwa dominasi mereka didunia internasional akan terancam oleh kekuatan nuklir baru akan bisa dihapuskan. Apabila negara seperti Iran, Iraq maupun Korea Utara mempunyai persenjataan nuklir, maka ditakutkan bahwa stabilitas keamanan dunia akan terganggu. Sementara negara-negara seperti Israel, Pakistan maupun India yang notabene bukan penandatangan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir saat ini mempunyai persenjataan nuklir adalah sah-

membantu mereka menghilangkan imej kekhawatiran. Iran adalah kasus yang berbeda.

Sejarah kelabu hubungan Iran dan Barat pasca Revolusi Iran 1979 menjadi sebab pengajuan kasus nuklir Iran ke DK PBB. Naiknya Mahmoud Ahmadinejad yang keras sebagai presiden Iran mendukung kekhawatiran ini. Lebih-lebih ungkapan Presiden Bush pasca tragedi 9/11 yang meletakkan Iran sebagai bagian dari 'Axis of Evil' bersama Iraq dan Korea Utara memperkuat keinginan P-5 untuk menjaga eksklusifitas kekuatan nuklirnya.

Kemungkinan ketiga bahwa PBB tidak mampu menjaga hak dan kedaulatan anggotanya didalam menentukan kebijakan negara juga muncul dari krisis nuklir Iran ini. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Mahmoud Ahmadinejad sebagai reaksi atas pengajuan masalah nuklir Iran ke DK PBB, menghalangi Iran untuk menentukan kebijakannya dalam hal teknologi nuklir sama halnya dengan 'scientific apartheid'.³⁹

Sebab dengan memberikan kesempatan kepada negara lain seperti India, Pakistan maupun Israel untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil bahkan memiliki persenjataan nuklir dan pada saat yang sama menghalangi Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil dengan dalih kekhawatiran akan terjadi pembelokan menuju pengembangan persenjataan nuklir menjadi bukti sikap apartheid keilmuan ini.

Lebih lanjut lagi, Iran adalah penandatangan Perjanjian Non-proliferasi Nuklir dan selama dua tahun terakhir melakukan kerjasama yang bagus dengan Badan Atom Internasional untuk melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap fasilitas-fasilitas nuklir Iran. Konklusi terakhir dari tim penyelidik Badan Atom Internasional adalah bahwa Iran tidak mempunyai fasilitas nuklir yang disembunyikan dan bahwa Iran benar-benar mempunyai tujuan untuk mengembangkan teknologi nuklir sipil.

Sebagai penutup, mengutip kata-kata Kepala Badan Energi Atom Internasional, Mohammed El Baradei, dalam menyikapi kasus Iran bahwa saat ini kita berada didalam 'fase kritis', tetapi kita belum sampai kepada 'fase krisis' bisa dikatakan bahwa kasus Iran ini menjadi pelajaran yang berharga bagi semua Negara didunia.

Bahwa sikap tergesa-gesa dengan mengajukan Iran ke DK PBB hanya akan mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang sama seperti yang telah terjadi di Afghanistan maupun Iraq. ketakutan tentang teknologi persenjataan nuklir akan jatuh ketangan teroris telah menimbulkan penghancuran Taliban di Afghanistan. Rezim Saddam Hussein di Iraq juga mengalami hal serupa karena dituduh mempunyai Senjata Pemusnah Masal. Rakyat Korea Utara harus menanggung derita sangsi ekonomi karena teknologi nuklir yang dipunyainya. Resolusi pengajuan permasalahan teknologi nuklir Iran ke DK PBB sudah diambil. Sifat

mana nantinya akan bergerak, apakah 'fase krisis' akan ditemui, semuanya sekarang tergantung kepada pilihan yang akan diambil oleh Teheran.

C. Kebijakan Iran seputar nuklir

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad kemarin (07/02) memerintahkan Organisasi Tenaga Atom Iran untuk mulai memproduksi uranium padat dengan tingkat kemurnian 20 persen, sebenarnya beberapa hari yang lalu, baru saja dia mengumumkan menyetujui pengayaan uranium Iran dilakukan di luar negeri. Analisis berpendapat, pada saat peka situasi dewasa ini, Iran menerapkan taktik dua tangan dengan negara-negara Barat.⁴⁰ Ketua Organisasi Tenaga Atom Iran Ali Akbar Salehi mengatakan, begitu perundingan transaksi bahan bakar dengan negara-negara terkait gagal, Iran akan segera memproduksi uranium padat dengan kemurnian 20 persen.

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) mengajukan beberapa rancangan, dalam mana meminta Iran mengirim 1.100 kilogram uranium padat kemurnian rendah ke Rusia untuk diolah lebih lanjut, kemudian Perancis memproduksi bahan bakar nuklir yang digunakan oleh reaktor nuklir Iran untuk tujuan penelitian. Namun rancangan itu selalu ditolak Iran. Ahmadinejad menyatakan, "tidak ada masalah" uranium padat Iran dikirim ke luar negeri untuk memproduksi bahan bakar nuklir. Ia tidak mempertahankan pendirian Iran sebelumnya, yakni serah-terima bahan

⁴⁰ <http://indonesian.cri.cn/2010/02/08/16107814.htm>

bakar nuklir semestinya dilakukan secara bertahap di wilayah Iran atau Turki, masyarakat internasional harus memberikan jaminan seratus persen atas serah-terima bahan bakar nuklir tersebut. Tapi keinginan Ahmadinejad itu tidak mendapat tanggapan positif negara-negara Barat.⁴¹

Pada Pertemuan Politik Keamanan Munich yang digelar baru-baru ini, Pembantu Presiden AS untuk Urusan Keamanan James Jones menyatakan, kini masyarakat internasional telah menghasilkan kesepakatan sebelumnya seputar masalah nuklir Iran. Apabila Iran tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Iran akan dikenakan sanksi lebih keras bahkan lebih terisolasi. Komisararis Uni Eropa untuk Kebijakan Diplomatik dan Keamanan Catherine Ashton mengatakan, Iran harus memberikan tanggapan serius atas usul pertukaran bahan bakar nuklir IAEA, agar menjalin kepercayaan yang dibutuhkan secara mendesak.

Negara-negara Barat terus memberikan tekanan kepada Iran dalam Pertemuan Politik Keamanan Munich, namun di dalam negeri Iran, muncul pula suara yang berbeda mengenai pertukaran bahan bakar. Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengecam rancangan pertukaran bahan bakar adalah suatu "penipuan politik", dan menyebut negara-negara Barat bermaksud menipu Iran menyerahkan uranium padat dengan persetujuan itu. Pengamat berpendapat, suara berbeda yang masing-masing dikeluarkan oleh Ahmadinejad dan Larijani menyatakan memang adanya perselisihan pendapat di dalam negeri Iran mengenai apakah menerima

⁴¹ <http://kompas.com/konflik-pendidikan-bertemu-pesakit-10-01-08/>

rancangan IAEA tersebut. Politik nuklir Iran disusun oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan disetujui oleh Pemimpin Tertinggi Iran, dan kemudian baru berlaku. Meski presiden menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, namun hak mengambil keputusan tetap di tangan Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran. Khamenei sejauh ini masih belum menyatakan sikapnya, maka keputusan final Iran seputar masalah itu masih sulit diramalkan. Patut dicatat, pada tahun lalu Iran dan pihak terkait sempat mencapai persetujuan tahap awal mengenai pertukaran bahan bakar nuklir di Jenewa, yang telah disetujui oleh Ahmadinejad, namun pendirian Iran berubah lagi karena pendapat nada keras dari Larijani, masalah nuklir Iran yang baru menunjukkan peredaan sekali lagi terjerumus dalam kemacetan.

Perundingan masalah nuklir Iran tidak selalu mengalami kemajuan, dan baru-baru ini, AS dikabarkan sedang mempercepat penempatan sistem pertahanan rudal di kawasan Teluk. Sehubungan dengan hal itu, Iran meningkatkan pula kesiagaan. Dan pemerintah Iran mengumumkan mulai membuat dua rudal baru.

Masalah Iran cukup rumit dan disebabkan oleh konfrontasi jangka panjang antara Iran dengan negara-negara Barat, kedua pihak sangat sulit untuk saling percaya dan usul pihak manapun sulit diterima pihak lawannya. Menurut analis, dalam suatu waktu yang cukup lama, Iran tetap akan menghadapi tekanan Barat dengan dua tangan yang akan tetap

Langkah lain yang diambil Iran adalah menawarkan konsorsium yang dikepalai Prancis, salah satu negara yang menentang aktivitas pengayaan uranium, untuk mengolah nuklir Iran. Namun, semua kebijakan Iran ini ditolak Amerika dan sekutu Barat-nya. Sebaliknya, Amerika khususnya terus menakut-nakuti komunitas internasional bahwa program nuklir Iran yang dikatakan bertujuan damai itu sesungguhnya hanyalah kedok untuk membuat senjata nuklir di kemudian hari. Tuduhan-tuduhan yang hanya berdasarkan kecurigaan dan asumsi ini dijawab Iran, melalui pernyataan pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Ali Khamenei, bahwa Islam tidak membenarkan kepemilikan senjata pemusnah massal dan bahwa senjata jenis ini tidak masuk dalam strategi pertahanan Iran.

Bantahan-bantahan Iran mendapat dukungan IAEA. Ketua IAEA Mohammad El-Baradei, dalam berbagai wawancara publik, menyatakan tidak ada indikasi Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Pada 22 November, El-Baradei memberikan laporan lengkap kepada Dewan Gubernur IAEA tentang kerja sama Iran dengan IAEA. Dalam laporannya, El-Baradei menyatakan sudah ada kemajuan dalam hubungan dengan verifikasi mengenai perolehan teknologi pengayaan alat pemutar (*centrifuge*) P1 dan P2--yang selalu dijadikan alasan bagi Amerika untuk menuduh Iran membuat senjata nuklir. Dan IAEA menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan oleh Iran dalam kaitan ini konsisten dengan investigasi IAEA sendiri.⁴²

anggota DK-PBB menyatakan kesiapannya untuk membantu menyelesaikan kebuntuan menyangkut persoalan bahan bakar nuklir Iran dan negara itu juga memandang penyelesaian diplomatik menjadi jalan yang terbaik.⁴⁵

Presiden AS Barack Obama pun dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Turki Tayyip Erdogan di Washington mengatakan Turki bisa menjadi pemain penting dalam menyelesaikan konflik atas program nuklir Iran. Obama menekankan pentingnya menyelesaikan masalah nuklir Iran dengan cara mengizinkan Iran mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai dan memberikan jaminan bahwa program nuklir itu mematuhi aturan-aturan dan norma internasional.⁴⁶

Jika Iran menjadi kekuatan nuklir, upaya perdamaian akan lumpuh di wilayah itu dan sebuah perlombaan senjata yang serius akan terjadi. Negara-negara Arab, dimulai dengan Arab Saudi, akan mencari cara yang sama untuk memiliki senjata nuklir. Apakah transfer kekuatan nuklir terkendali ke negara-negara ketiga, dalam kata lain, akan kemungkinan memiliki senjata nuklir pasar membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman untuk hidup.⁴⁷

Menteri Luar Negeri Turki Ahmet Davutoglu, mengatakan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk memecahkan perselisihan soal

⁴⁵ <http://bataviase.co.id/node/179233>

⁴⁶ <http://www.detiknews.com/read/2009/12/08/163220/1256283/10/obama-turki-bisa-jadi-pemain-penting-dalam-isu-nuklir-iran>

⁴⁷ <http://www.hurriyetdailynews.com/n.php%3Fn%3Diran8217s-nuclear-aspirations-can-put-turkey-into-a-difficult-position-2010-04-08>

program nuklir Iran, dan Ankara siap memediasi antara Teheran dan Barat. Menlu Davutoglu berada di Iran untuk pembicaraan tingkat tinggi dengan para pejabat Iran soal beragam isu termasuk program nuklir kontroversial Republik Islam, yang oleh Barat diyakini akan mengarah pada pembuatan senjata nuklir.

Iran telah berulang kali membantah keras tuduhan negara-negara Barat tersebut. Menlu Davutoglu dalam konferensi pers mengatakan Turki telah siap bertindak sebagai mediator dalam masalah pertukaran bahan bakar nuklir dan berharap dapat berperan dalam masalah ini. Menlu Iran Manouchehr Mottaki menambahkan mereka akan terus melakukan usaha terbaiknya untuk melihat apa yang dapat mereka lakukan untuk barter bahan bakar nuklir ini. Mereka berencana akan berunding dengan semua 15 anggota Dewan Keamanan PBB dalam usaha mengatasi jalan buntu menyangkut perjanjian bahan bakar nuklir.⁴⁸ Perundingan-perundingan itu akan dipusatkan pada (perjanjian) pertukaran bahan bakar dan itu akan dilakukan oleh misi-misi Iran di negara-negara tersebut.

Sebelumnya, Perundingan dengan negara-negara besar menyangkut nuklir Iran mengalami kebuntuan lantaran Iran bersikukuh akan mengirimkan uraniumnya. Jika negara-negara berkuasa mengirimkan lebih dahulu energinya sebagai kompensasi. Bagi negara-negara Barat. Melucuti stok uranium Iran merupakan tujuan utama. Mereka khawatir Iran berambisi melakukan pengayaan uranium diluar batas sehingga

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad meminta lembaga tenaga atom Iran mulai melakukan pengayaan uranium hingga 20 persen untuk digunakan dalam aktivitas riset medis. Ahmadinejad menegaskan, Iran mampu melakukan pengayaan uranium sendiri hingga skala tinggi dengan teknologi laser. Meski demikian ia masih membuka pintu bagi Barat untuk menuntaskan pelaksanaan transaksi tukar-menukar uranium dengan Iran. Jika mereka tidak setuju, maka Iran akan melakukan sendiri proses pengayaan uranium itu. Pernyataan Ahmadinejad itu sebagai reaksi atas sikap ragu-ragu Barat dalam melihat kesediaan Iran melakukan transaksi tukar-menukar bahan uranium.⁴³

Sementara itu, menteri luar negeri Iran Manouchehr Mottaki pada konferensi keamanan di Munich, Jerman, mengungkapkan, dia telah melakukan diskusi dengan Direktur IAEA (Badan Tenaga Atom Internasional) Yukiya Amano tentang rincian rencana tukar-menukar uranium. Menurut Mottaki, Iran menghendaki pelaksanaan tukar-menukar bahan uranium itu dilakukan dalam satu waktu, dan pihak Iran yang menentukan kadar bahan uranium yang dipertukarkan itu. Adapun menteri pertahanan AS Robert Gates dalam temu pers di Ankara, Turki, menyatakan, dia tidak merasakan akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Ia menambahkan, jika Iran siap menerima usulan asli kelompok negara 5+1 (AS, Perancis, Inggris, Rusia, China, ditambah Jerman) di

⁴³ . http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=88277:iran-bagikan-kerns-terhadap-barat-soal-isu-nuklir&catid=16&Itemid=20

Geneva pada 1 Oktober 2009, maka hal itu layak mendapat tanggapan positif dari Barat. Negara 5+1 itu mengusulkan agar Iran menyerahkan 1.200 kilogram bahan uranium berpengayaan rendah dalam satu waktu kepada pihak yang disepakati bersama. Kelompok negara 5+1 mencalonkan Rusia dan Perancis sebagai negara penerima bahan uranium Iran untuk diperkaya hingga mencapai kadar 20 persen. Gates mengatakan sebaiknya Iran mendiskusikan usulan barunya dengan IAEA bukan di arena konferensi keamanan di Muenchen atau melalui konferensi pers yang digelar Ahmadinejad.

Adapun sikap Rusia masih belum sejalan dengan Barat. Deputy PM Rusia Sergei Ivanov dalam arena konferensi keamanan di Munich menegaskan, sanksi baru yang akan dijatuhkan kepada Iran harus fokus pada upaya pencegahan penyebaran senjata nuklir, bukan menyentuh ekonomi, budaya, dan kemanusiaan.⁴⁴

D. Peran Strategis Turki

Turki yang mempunyai hubungan yang baik dengan kedua belah Negara yang bersitegang, mau tidak mau harus menjadi penengah masalah nuklir Iran ini, jika Turki mengelak untuk menjadi penengah, maka di khawatirkan akan berdampak buruk bagi dalam negeri Turki itu sendiri, baik itu politik, ekonomi maupun militer. Turki sebagai salah satu

⁴⁴ .MONAASRIATI.http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=882

77-iran bersikap keras terhadap barat soal isu nuklir&catid=16&Itemid=20

berpotensi dijadikan senjata pemusnah, Namun Teheran menolak tuduhan itu. Turki yang mempunyai hubungan baik dengan kedua belah pihak membuka Jalan untuk saling berkompromi.⁴⁹

⁴⁹ http://www.tempointeraktif.com/hg/timara/2010/04/21/hg-20100421-241061_id.html